



KABUPATEN NATUNA

RENJA

RENCANA KERJA

KECAMATAN BUNGURAN TIMUR



2026

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD.

Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ranai, 24 September 2025


**Pt. CAMAT BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA**
SYUPARMAN, S.E., M.M
NIP. 19811209 200701 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bunguran Timur Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2. Telaahan Terhadap RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025	42
3.3. Tujuan dan Sasaran	43
3.4. Kebijakan Program dan Kegiatan.....	48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja Program	50
4.2. Cascading dan Crosscutting	57

BAB V PENUTUP 60

DAFTAR TABEL

2.1.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya	12
2.1.2	Capaian Indikator Program Tahun Sebelumnya	23
2.1.3	Capaian Indikator Kegiatan Tahun Sebelumnya	23
2.2.1	Capaian Kinerja Pelayanan 2022-2024	25
2.4.1	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5.1	Daftar Usulan Musrenbang Tahun untuk TA 2026	35
3.3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2026.....	46
3.3.2	Tujuan, Sasaran dan ProgramTahun 2026	47
3.4.1	Indikator Sasaran Program	48
4.4.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2026	
	Prakiraan maju Tahu 2027	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna terbentuk sebagai bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kecamatan Bunguran Timur merupakan unsur penunjang Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintah.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Camat mempunyai tugas merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kecamatan.

b. Fungsi dan Kewenangan

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Sebelum Penetapan Renja setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16, pasal 126 dan pasal 131 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan sesuai dengan tahapan.

Diantara tahapan penyusunan dokumen Renja yang harus dilalui oleh Perangkat Daerah adalah : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan rancangan Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Renja Perangkat Daerah

Renja Kecamatan Bunguran Timur merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Bunguran Timur yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna. Renja Kecamatan Bunguran Timur memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bunguran Timur dalam 1 (satu) tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program, kegiatan dan sub kegiatan. Pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Kecamatan Bunguran Timur mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Bunguran Timur mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Camat Bunguran Timur tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Bunguran Timur meliputi :

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Kecamatan Bunguran Timur mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;

- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Kecamatan Bunguran Timur dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Bunguran Timur yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Rencana Kerja Kecamatan Bunguran Timur memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Kecamatan Bunguran Timur, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), dan memperhatikan dokumen Renstra Kecamatan Bunguran Timur tahun 2021-2026. Renja Kecamatan Bunguran Timur selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

Tahapan proses penyusunan dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eevaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 90).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tahun 2026 sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Bunguran Timur disusun sebagai pedoman dan arah bagi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Bunguran Timur.

2. Tujuan

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Bunguran Timur ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Kecamatan Bunguran Timur ke dalam program kegiatan dan sub kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bunguran Timur
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja mencakup telaahan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing masing unit kerja dan atau laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun berkenaan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah meliputi seluruh program dan kegiatan menyangkut realisasi capaian target kinerja kelaoran keiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah 2022-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Bunguran Timur

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp 13.293.001.318,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.342.613.235,00 atau sebesar 85.33 %.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 dan capaian Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

c. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Ranai Kota)
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Bandarsyah)

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Ranai Darat)
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Batu Hitam)
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
 - 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- e. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - 1) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
- 2. Program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dikarenakan terjadinya Rasionalisasi anggaran.
- 3. Penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :
 - a. Komitmen dan kerja sama dari pimpinan unit, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- 4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Bunguran

Timur secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra.

5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2026 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bunguran Timur s/d Tahun 2023 terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Bunguran Timur pada Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Timur																					
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
1	2	3	4	4A	5		6		7				12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																			
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	120,000,000	15	206,054,338	20	120,000,000	20	219,180,000	20	206,054,338	100.00	94.01	100	206,054,338	100.00	171.71	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	206,054,338	100	120,000,000	100	219,180,000	100	206,054,338	100.00	94.01	100	206,054,338	100.00	171.71	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120,000,000	1	206,054,338	1	120,000,000	1	219,180,000	1	206,054,338	100.00	94.01	2	206,054,338	100.00	171.71	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7.01.		KECAMATAN																			
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79.95	50,082,000	80	37,661,072	79.95	55,000,000	79.95	24,581,000	71	13,080,072	89.00	53.21	71.2	37,661,072	89.00	75.20	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	50,082,000	75	37,661,072	70	55,000,000	70	24,581,000	65	13,080,072	86.67	53.21	65	37,661,072	86.67	75.20	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
1	2	3	4	4A	5		6		7				12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	3	37,661,072	2	20,000,000	2	24,581,000	2	13,080,072	66.67	53.21	5	37,661,072	100.00	188.31	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30,082,000	0	0	2	35,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	8,091,519,012	85	16,060,096,948	85	8,800,601,012	85	9,622,132,792	65	8,142,671,588	76.47	84.62	65	16,060,096,948	76.47	198.48	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	6,346,020,012	1	12,321,892,074	1	6,346,020,012	1	6,865,092,772	1	6,327,276,234	100.00	92.17	1	12,321,892,074	100.00	194.17	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	49	6,346,020,012	49	12,321,892,074	49	6,346,020,012	49	6,865,092,772	48	6,327,276,234	97.96	92.17	48	12,321,892,074	97.96	194.17	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	95,000,000	95	126,556,486	95	180,000,000	95	126,500,000	70	62,856,486	73.68	49.69	70	126,556,486	73.68	133.22	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	50,000,000	1	36,531,672	1	60,000,000	1	42,500,000	1	17,831,672	100.00	41.96	2	36,531,672	100.00	73.06	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	6	90,024,814	3	120,000,000	3	84,000,000	3	45,024,814	50.00	53.60	9	90,024,814	300.00	200.06	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
1	2	3	4	4A	5		6		7				12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	474,564,000	75	771,339,014	75	569,564,000	75	649,215,000	60	313,981,014	80.00	48.36	135	771,339,014	180.00	162.54	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	111,000,000		0	12	116,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	12	85,196,100	12	12,000,000	12	52,500,000	9	27,538,100	75.00	52.45	21	85,196,100	175.00	709.97	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	46,400,000	12	295,521,000	12	60,000,000	12	238,720,000	9	152,521,000	75.00	63.89	21	295,521,000	175.00	636.90	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	12	34,991,900	12	60,000,000	12	40,595,000	9	14,991,900	75.00	36.93	21	34,991,900	175.00	58.32	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	8,000,000		0	12	8,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	60,000,000	1	87,487,536	1	60,000,000	1	75,600,000	1	36,887,536	100.00	48.79	2	87,487,536	200.00	145.81	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	169,964,000	40	268,142,478	40	241,564,000	40	241,800,000	63	82,042,478	157.50	33.93	103	268,142,478	257.50	157.76	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	17	7,200,000		0	17	12,000,000	17	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	190,000,000	75	1,148,257,375	75	599,082,000	75	945,708,000	65	558,400,375	86.67	59.05	140	1,148,257,375	186.67	604.35	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
1	2	3	4	4A	5		6		7				12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	1	519,220,000	1	40,000,000	1	281,300,000	8	249,220,000	800.00	88.60	9	519,220,000	900.00	1,298.05	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	4	0	4	130,000,000	4	69,751,000	0	0	0.00	0.00	4	0	100.00	0.00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	5	629,037,375	5	367,082,000	5	544,657,000	24	309,180,375	480.00	56.77	29	629,037,375	580.00	629.04	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	30,000,000	0	0	2	62,000,000	2	50,000,000	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	727,500,000	100	1,423,272,866	100	747,500,000	100	880,551,700	50	767,783,666	50.00	87.19	150	1,423,272,866	150.00	195.64	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000	12	60,897,250	12	8,000,000	12	31,158,000	9	29,739,250	75.00	95.45	21	60,897,250	175.00	761.22	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	60,000,000	12	67,124,917	12	60,000,000	12	104,531,300	9	32,724,917	75.00	31.31	21	67,124,917	175.00	111.87	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	659,500,000	12	1,295,250,699	12	679,500,000	12	744,862,400	9	705,319,499	75.00	94.69	21	1,295,250,699	175.00	196.40	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	258,435,000	75	268,779,133	75	358,435,000	75	155,065,320	60	112,373,813	80.00	72.47	135	268,779,133	180.00	104.00	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	5	68,435,000	6	160,734,763	5	68,435,000	5	100,355,320	5	62,689,443	100.00	62.47	11	160,734,763	220.00	234.87	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
1	2	3	4	4A	5		6		7				12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																		
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000	5	34,910,000	5	30,000,000	5	18,110,000	5	13,150,000	100.00	72.61	10	34,910,000	200.00	69.82	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	120,000,000	5	73,134,370	5	140,000,000	5	36,600,000	1	36,534,370	20.00	99.82	6	73,134,370	120.00	60.95	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	20,000,000	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	363,558,000	20	259,787,069	100	463,558,000	100	76,501,916	75	30,886,433	75.00	40.37	95	259,787,069	95.00	71.46	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	363,558,000	100	259,787,069	55	463,558,000	55	76,501,916	51	30,886,433	92.73	40.37	151	259,787,069	274.55	71.46	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Laporan	12	363,558,000	1	259,787,069	12	463,558,000	12	76,501,916	9	30,886,433	75.00	40.37	10	259,787,069	83.33	71.46	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
1	2	3	4	4A	5		6		7				12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	41,100,000	100	138,068,880	100	101,100,000	100	124,066,540	50	84,316,964	50.00	67.96	150	138,068,880	150.00	335.93	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	41,100,000	60	138,068,880	100	101,100,000	100	124,066,540	50	84,316,964	50.00	67.96	110	138,068,880	110.00	335.93	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	41,100,000	12	138,068,880	8	101,100,000	8	124,066,540	8	84,316,964	100.00	67.96	20	138,068,880	250.00	335.93	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	100	132,417,140	25	40,000,000	25	43,919,550	70	31,400,600	280.08	71.50	170.02	132,417,140	680.08	662.09	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	20,000,000	100	132,417,140	80	40,000,000	80	43,919,550	70	31,400,600	87.53	71.50	170.02	132,417,140	212.53	662.09	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	8	132,417,140	12	40,000,000	12	43,919,550	8	31,400,600	66.67	71.50	16	132,417,140	133.33	662.09	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Persen	100	102,000,000	100	131,462,209	100	90,000,000	100	82,996,140	75	57,216,069	75.00	68.94	175	131,462,209	175.00	128.88	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
1	2	3	4	4A	5		6		7				12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
			pemerintahan desa																		
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	102,000,000	100	131,462,209	100	90,000,000	100	82,996,140	75	57,216,069	75.00	68.94	175	131,462,209	175.00	128.88	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	30,000,000	8	69,772,009	8	30,000,000	8	41,156,440	8	30,865,569	100.00	75.00	16	69,772,009	200.00	232.57	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	72,000,000	12	61,690,200	12	60,000,000	12	41,839,700	9	26,350,500	6.00	62.98	21	61,690,200	175.00	85.68	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7.01.		KECAMATAN																			
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	100	1,503,736,598	100	213,389,500	100	864,380,000	75	729,486,598	75.00	84.39	175	1,503,736,598	175.00	1,420.10	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	60	1,503,736,598	55	213,389,500	55	864,380,000	45	729,486,598	81.82	84.39	105	1,503,736,598	190.91	1,420.10	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
1	2	3	4	4A	5		6		7				12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	1,503,736,598	12	213,389,500	12	864,380,000	9	729,486,598	75.00	84.39	21	1,503,736,598	175.00	1,420.10	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000	0	100	200,000,000	100	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000	0	4	200,000,000	4	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000	0	5	200,000,000	5	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7.01.		KECAMATAN																			
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	100	1,506,300,070	100	213,389,500	100	915,655,000	75	679,275,070	75.00	74.18	175	1,506,300,070	175.00	1,422.52	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	60	1,506,300,070	55	213,389,500	55	915,655,000	65	679,275,070	118.18	74.18	125	1,506,300,070	227.27	1,422.52	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
1	2	3	4	4A	5		6		7				12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	1,506,300,070	12	213,389,500	12	915,655,000	9	679,275,070	75.00	74.18	21	1,506,300,070	175.00	1,422.52		
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000		0	100	200,000,000	100		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000		0	4	200,000,000	4		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000		0	5	200,000,000	5		0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																				
7.01.		KECAMATAN																				
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	100	931,118,762	100	213,389,500	100	586,458,380	75	406,790,382	75.00	69.36	175	931,118,762	175.00	879.33		
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	60	931,118,762	55	213,389,500	55	586,458,380	25	406,790,382	45.45	69.36	85	931,118,762	154.55	879.33		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
1	2	3	4	4A	5		6		7				12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	931,118,762	12	213,389,500	12	586,458,380	9	406,790,382	75.00	69.36	21	931,118,762	175.00	879.33	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000		0	100	200,000,000	100	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000		0	4	200,000,000	4	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000		0	5	200,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7.01.		KECAMATAN																			
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	100	1,169,518,466	100	213,389,500	100	733,130,000	75	518,018,466	75.00	70.66	175	1,169,518,466	175.00	1,104.47	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	60	1,169,518,466	55	213,389,500	55	733,130,000	68	518,018,466	123.64	70.66	128	1,169,518,466	232.73	1,104.47	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
1	2	3	4	4A	5		6		7				12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	1,169,518,466	12	213,389,500	12	733,130,000	9	518,018,466	75.00	70.66	21	1,169,518,466	175.00	1,104.47	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000		0	100	200,000,000	100	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000		0	4	200,000,000	4	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000		0	5	200,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Tabel 2.1.2 Capaian Indikator Program Tahun Sebelumnya

Program	Indikator	Target	Capaian
Program Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	100	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKJiP	79,95	71,20
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	85	85
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100	90
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pesentase pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan	100	95
Program Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pesentase pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	80
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100

Tabel 2.1.3 Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	70
dministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95

Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	75
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	80
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	80
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	60
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	80
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	75
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada tahun 2024 secara keseluruhan belum relatif baik dikarenakan adanya Rasionalisasi. Hal ini terlihat dari 7 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2024, semuanya telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan fungsi lainnya tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2.1

15
16
17

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2022-2024

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Akhir RENSTRA (2026)	Target			Realisasi			Capaian		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Program Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	0	100	100	100	100	100	0	100	100	0	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79,87	80	79,90	79,95	79,95	72,34	65,65	71,20	90,54	82,11	89,05
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	90	80	85	85	80	85	85	100,00	100,00	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persen	0	100	100	100	100	85	90	90	85	90,00	90,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pesentase pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan	Persen	0	100	100	100	100	80	95	95	80	95,00	95,00
Program Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pesentase pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	0	100	100	100	100	80	80	80	80	80,00	80,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00

18

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Kecamatan Bunguran Timur sebagai berikut :
 - 1) Belum optimalnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur
 - 2) Belum optimalnya Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat
 - 3) Belum optimalnya Pembenahan dan Peningkatan Infrastruktur di wilayah Kecamatan Bunguran Timur
 - 4) Masih lemahnya integritas data antara Kecamatan Bunguran Timur dan Perangkat Daerah
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bunguran Timur adalah sebagai berikut :
 - 1) Kecamatan Bunguran Timur memiliki tantangan untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu strategis di Kabupaten Natuna, meliputi :
 - a. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal
 - b. Pemerataan dan Mutu Pendidikan masih rendah
 - c. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal
 - d. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur belum memadai
 - e. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi
 - f. Peningkatan pendapatan masyarakat
 - g. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
 - h. Menciptakan lapangan kerja baru atau tenaga kerja terampil
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bunguran Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik.
- 2) Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan.
- 3) Banyaknya pembenahan infrastruktur di wilayah Kecamatan Bunguran Timur.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Kecamatan Bunguran Timur dengan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah.
- b) Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kebijakan pelayanan publik dan meningkatkan kebijakan bina mental spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Bunguran Timur adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Bunguran Timur sesuai dengan kebutuhan Rill Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada table review berikut

Tabel 2.4.1

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal Renja Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2026

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				HASIL ANALIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
07.	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR					11,849,032,900			11,849,032,900
07.01.	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR					9,982,474,900			9,982,474,900
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					120,000,000			120,000,000
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH					120,000,000			120,000,000
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN		PERSEN	20	120,000,000	20	PERSEN	120,000,000
4.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Kecamatan Bunguran Timur	Persen	100	120,000,000	100	Persen	120,000,000
4.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kecamatan Bunguran Timur	Dokumen	1	120,000,000	1	Dokumen	120,000,000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					9,862,474,900			9,862,474,900
7.01.	KECAMATAN					9,862,474,900			9,862,474,900
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP		NILAI	79.95	80,082,000	79.95	NILAI	80,082,000
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	70	80,082,000	70	Persen	80,082,000
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kecamatan Bunguran Timur	Dokumen	3	20,000,000	3	Dokumen	20,000,000
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bunguran Timur	Laporan	2	60,082,000	2	Laporan	60,082,000
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP		PERSEN	85	9,005,734,900	85	PERSEN	9,005,734,900
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tepat Waktu	1	6,346,020,012	1	Tepat Waktu	6,346,020,012
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bunguran Timur	Orang/bulan	49	6,346,020,012	49	Orang/bulan	6,346,020,012
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persen	95	140,000,000		Persen	140,000,000
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Bunguran Timur	Paket	1	50,000,000	1	Paket	50,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				HASIL ANALIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kecamatan Bunguran Timur	Orang	6	90,000,000	6	Orang	90,000,000
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran		Persen	75	629,564,000	75	Persen	629,564,000
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bunguran Timur	Paket	12	160,000,000	12	Paket	160,000,000
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Bunguran Timur	Paket	12	12,000,000	12	Paket	12,000,000
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Bunguran Timur	Paket	12	60,000,000	12	Paket	60,000,000
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kecamatan Bunguran Timur	Dokumen	12	8,000,000	12	Dokumen	8,000,000
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Bunguran Timur	Paket	1	60,000,000	1	Paket	60,000,000
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bunguran Timur	Laporan	40	314,364,000	40	Laporan	314,364,000
7.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Bunguran Timur	Dokumen	17	15,200,000	17	Dokumen	15,200,000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah		Persen	75	627,000,000	75	Persen	627,000,000
7.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Bunguran Timur	Unit	1	40,000,000	1	Unit	40,000,000
7.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Bunguran Timur	Unit	4	142,000,000	4	Unit	142,000,000
7.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bunguran Timur	Unit	5	400,000,000	5	Unit	400,000,000
7.01.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bunguran Timur	Unit	2	45,000,000	2	Unit	45,000,000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran		Persen	100	944,715,888	100	Persen	944,715,888
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bunguran Timur	Laporan	12	8,000,000	12	Laporan	8,000,000
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Bunguran Timur	Laporan	12	60,000,000	12	Laporan	60,000,000
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bunguran Timur	Laporan	12	876,715,888	12	Laporan	876,715,888

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				HASIL ANALIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran		Persen	75	318,435,000	75	Persen	318,435,000
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Bunguran Timur	Unit	6	68,435,000	6	Unit	68,435,000
7.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Bunguran Timur	Unit	5	50,000,000	5	Unit	50,000,000
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bunguran Timur	Unit	5	180,000,000	5	Unit	180,000,000
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bunguran Timur	Unit	2	20,000,000	2	Unit	20,000,000
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSEN	100	523,558,000	100	PERSEN	523,558,000
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan dikecamatan		Koordinasi	55	523,558,000	55	Koordinasi	523,558,000
7.01.02.2.02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bunguran Timur	Laporan	12	60,000,000	12	Laporan	60,000,000
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bunguran Timur	Laporan	12	463,558,000	12	Laporan	463,558,000
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN		PERSEN	100	101,100,000	100	PERSEN	101,100,000
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		Persen	100	101,100,000	100	Persen	101,100,000
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Bunguran Timur	Lembaga Kemasyarakatan	8	101,100,000	8	Lembaga Kemasyarakatan	101,100,000
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PERSEN	25	50,000,000	25	PERSEN	50,000,000
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara		Persen	80	50,000,000	80	Persen	50,000,000
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Bunguran Timur	Laporan	12	50,000,000	12	Laporan	50,000,000
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		PERSEN	100	102,000,000	100	PERSEN	102,000,000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan		Persen	100	102,000,000	100	Persen	102,000,000
7.01.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bunguran Timur	Dokumen	8	30,000,000	8	Dokumen	30,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				HASIL ANALIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
7.01.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bunguran Timur	Laporan	12	72,000,000	12	Laporan	72,000,000
07.02.	KELURAHAN RANAI KOTA					465,889,500			465,889,500
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					465,889,500			465,889,500
7.01.	KECAMATAN					465,889,500			465,889,500
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSEN	100	265,889,500	100	PERSEN	265,889,500
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan		Koordinasi	55	265,889,500	55	Koordinasi	265,889,500
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Ranai	Laporan	12	265,889,500	12	Laporan	265,889,500
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN		PERSEN	100	200,000,000	100	PERSEN	200,000,000
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan		Koordinasi	4	200,000,000	4	Koordinasi	200,000,000
7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ranai	Pokmas / Ormas	5	200,000,000	5	Pokmas / Ormas	200,000,000
07.03.	KELURAHAN BANDARSYAH					465,889,500			465,889,500
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					465,889,500			465,889,500
7.01.	KECAMATAN					465,889,500			465,889,500
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSEN	100	265,889,500	100	PERSEN	265,889,500
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan		Koordinasi	55	265,889,500	55	Koordinasi	265,889,500
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bandarsyah	Laporan	12	265,889,500	12	Laporan	265,889,500
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN		PERSEN	100	200,000,000	100	PERSEN	200,000,000
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan		Koordinasi	4	200,000,000	4	Koordinasi	200,000,000
7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bandarsyah	Pokmas / Ormas	5	200,000,000	5	Pokmas / Ormas	200,000,000
07.04.	KELURAHAN RANAI DARAT					465,889,500			465,889,500
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					465,889,500			465,889,500
7.01.	KECAMATAN					465,889,500			465,889,500
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSEN	100	265,889,500	100	PERSEN	265,889,500

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				HASIL ANALIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan		Koordinasi	55	265,889,500	55	Koordinasi	265,889,500
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Ranai Darat	Laporan	12	265,889,500	12	Laporan	265,889,500
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN		PERSEN	100	200,000,000	100	PERSEN	200,000,000
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan		Koordinasi	4	200,000,000	4	Koordinasi	200,000,000
7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Kelurahan Ranai Darat	Pokmas / Ormas	5	200,000,000	5	Pokmas / Ormas	200,000,000
07.05.	KELURAHAN BATU HITAM					468,889,500			468,889,500
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					468,889,500			468,889,500
7.01.	KECAMATAN					468,889,500			468,889,500
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSEN	100	268,889,500	100	PERSEN	268,889,500
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan		Koordinasi	55	268,889,500	55	Koordinasi	268,889,500
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Batu Hitam	Laporan	12	268,889,500	12	Laporan	268,889,500
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN		PERSEN	100	200,000,000	100	PERSEN	200,000,000
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan		Koordinasi	4	200,000,000	4	Koordinasi	200,000,000
7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Batu Hitam	Pokmas / Ormas	5	200,000,000	5	Pokmas / Ormas	200,000,000
JUMLAH						11,849,032,900			11,849,032,900

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan Daerah memiliki berbagai pendekatan dalam prosesnya, pendekatan itu diantaranya teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan bawah-atas atau bottom-up merupakan salah satu perwujudan Pemerintah Daerah yang mendorong partisipasi masyarakat, sebab ide pembangunan untuk saat ini tidak hanya dari pemerintah kepada masyarakat (top-down) tetapi juga yang bersifat mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu wadah untuk penyampaian usulan-usulan dari masyarakat, dimana tahapan atau proses musrenbang berlangsung mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota. Kecamatan Bunguran Timur melaksanakan musrenbang baik di tingkat Desa/kelurahan melalui 4 kelurahan 3 Desa se-Kecamatan Bunguran Timur dan juga di tingkat kecamatan. Adapun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pelaksanaan musrenbang di kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan.
2. Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA kabupaten/kota.
3. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
4. Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pembangunan desa.
5. Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.
6. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
7. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

8. Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD kabupaten/kota.

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun 2024 untuk rencana pembangunan tahun 2024 telah menetapkan sub kegiatan pada pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan baik untuk kegiatan yang bersumber dari APBD Kota maupun APBN harus berdasarkan usulan masyarakat yang mana dimusyawarahkan melalui musrenbang.

Kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat urgensi penanganan
- b. Pemenuhan Pelayanan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, PUPR, Perumkim, Sosial dan Penanganan Bencana)
- c. Mendorong percepatan prioritas pembangunan dalam RPJMD (Peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi).

Tabel 2.5.1
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DAFTAR USULAN PRIORITAS TINGKAT KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Fisik / Non Fisik	Volume	Pagu	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
				(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
I	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR					
1	Pembangunan Pagar Keliling Kantor Camat Bunguran Timur	Fisik	450 M	300.000.000	APBD Propinsi	Dinas PUPR / Dinas PERKIM Kab. Natuna
2	Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Bunguran Timur	Fisik	16 X 25 M	5.000.000.000	APBN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Pembangunan Pendopo Pertemuan Forum Anak Kecamatan Bunguran Timur	Fisik	10 x 10 M	350.000.000	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
II	KELURAHAN RANAI KOTA					
4	Lanjutan Pembangunan Masjid Al Jama'ah Air Lakon	Fisik	18 x 18 M	500.000.000	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Rehab Total Gedung Posyandu Dahlia Batu Kilang	Fisik	9 x 6 M	250.000.000	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Rehab Gedung Posyandu Lapan Dewa Cemaka	Fisik	6 x 9 M	150.000.000	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7	Rehab Gedung Posyandu Bina Sehat Puak	Fisik	6 x 9 M	150.000.000	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Fisik / Non Fisik	Volume	Pagu	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
8	Rehab Gedung Posyandu Melati Air Kolek	Fisik	9 x 15 M	150.000.000	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
III	KELURAHAN RANAI DARAT					
9	Pembangunan Drainase Jalan Rt. 005/Rw.001 Air Tawak Hilir Kelurahan Ranai Darat	Fisik	300 M	200.000.000	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10	Peningkatan hotmix Jl. Lingkar air manou Rt.001/Rw.005 Kelurahan Ranai Darat	Fisik	350 M	500.000.000	APBD	Dinas PUPR
11	Peningkatan hotmix Jl. Temadu Rt.004/Rw.003 tembus RSUD Kelurahan Ranai Darat	Fisik	1500 M	1.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
12	Peningkatan Hotmix Jl. Lingkar Air Kumbik Rt.005/RW.004	Fisik	1500 M	1.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
13	Overlay Hotmix Jalan Imam H. Ismail Kelurahan Ranai Darat	Fisik	3500 M	3.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
IV	KELURAHAN BANDARSYAH					
14	Pembebasan Lahan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pemuda Pering Rt.001/Rw.005 Pering	Fisik	1.500 M	500.000.000	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15	Pembangunan Gedung Posyandu Bunda Ratu Kaling III, Rt. 003/Rw.002 Padang Kurak	Fisik	6 x 9 M	300.000.000	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
16	Pembangunan Gedung Pertemuan/Balai Kegiatan Kaling II Air Raya	Fisik	10 x 10 M	300.000.000	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
17	Pembinaan Kesenian Daerah Kelurahan Bandarsyah	Non Fisik	6 Kelompok	120.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Fisik / Non Fisik	Volume	Pagu	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
18	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan Bandarsyah	Non Fisik	2 Lembaga	300.000.000	APBD	Dinas DPMD
V	KELURAHAN BATU HITAM					
19	Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana prasarana Kantor Kelurahan Batu Hitam	Fisik	800 M²	800.000.000	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
20	Rehabilitasi Rumah Ibadah - MUSHOLA AL-MUHAIMIN SMPN 1 Ranai Jl. Hang Tuah Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur	Fisik	1 Paket	150.000.000	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
21	Pembangunan Box Culvert Jl.soekarno-Hatta RT.006/RW.001	Fisik	100 Meter	200.000.000	APBD	Dinas PUPR
22	Lanjutan Pembangunan Jalan baru dari Gang Rawa Sagu menuju ke Jalan Pramuka RT.002/RW.005 Kelurahan Batu Hitam	Fisik	120 Meter	100.000.000	APBD	Dinas PUPR
23	Pengadaan Bibit Palawija (Cabe, Sawi, Seledri)	Non Fisik	5000 Buah	100.000.000	APBD	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian
24	Normalisasi Sungai Batu Hitam Kelurahan Batu Hitam	Non Fisik	3 KM	100.000.000	APBD	Dinas PUPR
VI	DESA SEPEMPANG					
25	Pembangunan Gedung Pasar Rakyat Masyarakat Desa Sepempang	Fisik	10 x 10 M	300.000.000	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
26	Pembangunan Gedung Kantor BUMDes Maju Jaya Desa Sepempang	Fisik	10 x 12 M	300.000.000	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Fisik / Non Fisik	Volume	Pagu	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
27	Pengadaan Alat Transportasi Laut (Pompong) Wisata Pulau Senua Desa Sepempang	Non Fisik	3 Unit	300.000.000	APBD	Dinas Pariwisata
28	Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Air Hijau Desa Sepempang	Fisik	500 M	200.000.000	APBD	Dinas PUPR
29	Pembangunan Batu Miring dari Sungai Teluk ke Puak Beringin Jaya Desa Sepempang	Fisik	200 M	200.000.000	APBD	Dinas PUPR
VII	DESA SUNGAI ULU					
30	Pembangunan Jalan Cual - Mahligai Dusun III Rt. 03/Rw.03 Desa Sungai Ulu	Fisik	1.300 M	1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
31	Pembangunan Jembatan Cual -Mahligai, Dusun II Rt.03/Rw.02 Desa Sungai Ulu	Fisik	27,3 x 6 M	3.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
32	Pembangunan Hotmix Jalan Kilo 3 Tanjung Kunah, Dusun I Rt. 05/Rw. 01 Samau Desa Sungai Ulu	Fisik	1 KM	6.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
33	Pengadaan Mesin Pencacah Rumput	Fisik	3 Unit	30.000.000	APBD	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian
34	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Fisik	22 Unit	77.000.000	APBD	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian
VIII	DESA BATU GAJAH					
35	Rehab Total Pustu Desa Batu Gajah Rt. 009 Air Palah, Rw. 001 Air Pucuk, Dusun I Air Jampung - Desa Batu Gajah	Fisik	8 x 12 M	500.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
36	Rehab Lantai Beton Tambatan Perahu Air Pucuk Rt. 002 Air Fahat / Rw. 002 Air Pucuk Dusun I - Desa Batu Gajah	Fisik	286 M3	400.000.000	APBD	Dinas Perikanan
37	Hotmix Jalan Gunung Lintang Rt. 004 Gunung Lintang Rw. 002 Air Bayar Dusun I	Fisik	1 Km	4.000.000.000	APBN	Dinas PUPR

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Fisik / Non Fisik	Volume	Pagu	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
38	Pengadaan Sapi Bagi Kelompok Ternak Desa Batu Gajah	Non Fisik	3 Kelompok	300.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
39	Pengadaan Traktor Bajak Tanah Bagi Petani Desa Batu Gajah	Non Fisik	2 Unit	300.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2025 - 2029, Visi Misi Presiden 2025 – 2029 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2025 – 2049. RPJMN 2025 – 2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui 8 (delapan) misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan argomaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan

lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

17 Program Prioritas Presiden :

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
2. Penyempurnaan Sistem Pemerintahan Negara
3. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia : Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat
8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif
10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta Penyandang Disabilitas
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan
14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKMelalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-kota Inovatif-Karakteristik Mandiri Lainnya
15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber aya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam Mewujudkan Keadilan

Ekonomi

16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Sedangkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) / Quick

Wins adalah sebagai berikut :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap dengan kualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat Negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Merujuk Permendagri 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah tentang RPJMD harus sudah di tetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 ialah untuk menjabarjab visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna menjadi dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan penyusunannya tetap mempedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan tingkat Provinsi dan Pusat serta dokumen perencanaan lainnya sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna ialah untuk mewujudkan pemmbangunan daerah Kabupaten Natuna sesuai dengan teraget capaian pada akhir tahun

perencanaan RPJMD, memberikan tolak ukur bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna, masyarakat, dan seluruh stakeholder dalam memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 1 (satu) tahunan maupun 5 (lima) tahunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan dan Wakil Bupati Jarmin, SE dengan visi dan misi

VISI

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA YANG MAKMUR BERDAYA
SAING DAN BERBUDAYA”**

MISI

1. Meningkatkan perekonomian berbasis kemaritiman dan keunggulan daerah yang berwawasan lingkungan
2. Peningkatan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan konektivitas antar pulau
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, berkarakter dan berbudaya
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi
5. Memperkuat nilai keagamaan dan melestarikan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan toleran

3.2 Telaahan Terhadap RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun 2026 berfokus pada tiga hal yaitu :

1. Pembangunan ekonomi daerah. Keterkaitan dengan fungsi Kecamatan Bunguran Timur adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan yang ada dikecamatan serta memberikan layanan public terhadap segala bentuk administrasi yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan.
2. Penguatan tata kelola pemerintahan. Keterkaitan dengan fungsi Kecamatan

Bunguran Timur adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki wewenang penuh dan tanggungjawab dalam menjamin terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik. Melaksanakan kebijakan upaya peningkatan kinerja, serta kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Keterkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur yaitu pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam upaya meningkatkan SDM melalui peningkatan bina mental Masyarakat, menjalin koordinasi dalam upaya peningkatan kualitas SDM pegawai dan Masyarakat.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Kecamatan Bunguran Timur merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah

dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna adalah Menciptakan Pemerintah Kecamatan yang Bersih, Berwibawa dengan memberikan Pelayanan Prima sedangkan Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna adalah Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan.

Tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Tahun 2026

MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Persentase rumah ibadah yang aktif ditingkat kecamatan	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada

Tabel 3.3.2
Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2026
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

SKPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU	Kondisi Awal	Target 1	Target 2	Target 3	Target 4	Target 5	Satuan	Formula	Sumber Data
Kecamatan Bunguran Timur	4.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4.1.1.1.1. Meningkatkan Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		3.05	3.08	3.10	3.15	3.18	3.20	Indeks	Nilai Indeks	Survey Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Bunguran Timur	4.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4.1.2.1.1. Meningkatkan Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		70,40	71.20	71.50	72.00	72.50	73.00	Nilai	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Inspektorat
Kecamatan Bunguran Timur	4.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Persentase rumah ibadah yang aktif ditingkat kecamatan	5.1.1.1.1. Meningkatkan pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina		70	70	70	80	80	90	Persen	Jumlah kegiatan keagamaan yang dibina / Jumlah kegiatan keagamaan x 100	Kasi PMD
Kecamatan Bunguran Timur	4.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	5.1.1.2.1. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada		65	70	75	80	85	90	Persen	Jumlah pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada di bagi Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan x 100	Kasi Trantib

3.4 Kebijakan Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan kebijakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Sesuai dengan arah Pembangunan RKPD tahun 2026, maka pada tahun 2026 arah kebijakan program kegiatan Kecamatan Bunguran Timur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu melalui upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pelayanan yang berbasis digital, transparansi pengelolaan keuangan, peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran dll. Diantara bentuk strategi nya adalah Fasilitasi peningkatan pelayanan publik bagi entitas yang memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat. Serta Peningkatan layanan administrasi kepegawaian.
2. Peningkatan Ekonomi DaPerah, yaitu melalui optimalisasi kebijakan perekonomian dan Pembangunan yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Mendorong penyerapan anggaran APBD seoptimal mungkin dalam bentuk percepatan belanja daerah fisik maupun non fisik. Melakukan koordinasi terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Bunguran Timur.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia, ada dua yang menjadi sasaran yaitu SDM Pemudaan sebagai asset daerah dan SDM Kepegawaian. SDM Kepemudaan melalui peningkatan pendidikan iman dan taqwa. strateginya yang akan ditempuh untuk peningkatan kualitas SDM yaitu penguatan IMTAQ kalangan remaja melalui kegiatan Bina Mental Spritual. Sementara SDM kepegawaian melalui peningkatan kompetensi pegawai melalui penyelenggaraan diklat fungsional, bimbingan teknis sesuai kebutuhan yang strategis.

Berikut adalah target kinerja program Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.4.1 Indikator Sasaran Program Kecamatan Bunguran Timur

Program	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja 2026
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Menigkatnya pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Pemenuhan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	30

Program	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja 2026
Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dibina	100
	Meningkatnya nilai laporan LKJiP	Nilai Laporan LKJiP	71.20
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemenuhan koodinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Program

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 serta Resntra Kecamatan Bunguran Timur 2022-2026.
2. Mendukung pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Natuna. Secara umum Kecamatan Bunguran Timur bertugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Kecamatan.
3. Keserasian dan keterpaduan Pembangunan baik perencanaan Pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka Pembangunan daerah.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan.
5. Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu isu strategis Kecamatan Bunguran Timur
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efiseinsi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah 6 program dan 12 kegiatan dan 30 Sub kegiatan
2. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rancangan Renja tahun 2026 adalah sebesar 11.849.032.900,00 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Enpat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) seperti Tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN NATUNA**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
07.	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR					11,849,032,900				11,479,522,962
07.01.	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR					9,982,474,900				9,626,914,962
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					120,000,000				120,000,000
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH					120,000,000				120,000,000
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	PERSEN		20	120,000,000			20	120,000,000
4.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen		100	120,000,000			100	120,000,000
4.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Kecamatan Bunguran Timur	1	120,000,000			0	120,000,000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					9,862,474,900				9,506,914,962
7.01.	KECAMATAN					9,862,474,900				9,506,914,962
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	NILAI		79.95	80,082,000			80.00	80,082,000
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		70	80,082,000			75	80,082,000
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kecamatan Bunguran Timur	3	20,000,000			0	20,000,000
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kecamatan Bunguran Timur	2	60,082,000			0	60,082,000
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	PERSEN		85	9,005,734,900			85	8,650,174,962
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu		1	6,346,020,012			1	6,017,460,074
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Kecamatan Bunguran Timur	49	6,346,020,012			0	6,017,460,074

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		95	140,000,000			95	140,000,000
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Kecamatan Bunguran Timur	1	50,000,000			0	50,000,000
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kecamatan Bunguran Timur	6	90,000,000			0	90,000,000
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen		75	629,564,000			75	602,564,000
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kecamatan Bunguran Timur	12	160,000,000			0	160,000,000
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kecamatan Bunguran Timur	12	12,000,000			0	12,000,000
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kecamatan Bunguran Timur	12	60,000,000			0	33,000,000
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kecamatan Bunguran Timur	12	8,000,000			0	8,000,000
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Kecamatan Bunguran Timur	1	60,000,000			0	60,000,000
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kecamatan Bunguran Timur	40	314,364,000			0	314,364,000
7.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Kecamatan Bunguran Timur	17	15,200,000			0	15,200,000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen		75	627,000,000			75	627,000,000
7.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Kecamatan Bunguran Timur	1	40,000,000			0	40,000,000
7.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kecamatan Bunguran Timur	4	142,000,000			0	142,000,000
7.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kecamatan Bunguran Timur	5	400,000,000			0	400,000,000
7.01.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Kecamatan Bunguran Timur	2	45,000,000			0	45,000,000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen		100	944,715,888			100	944,715,888
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kecamatan Bunguran Timur	12	8,000,000			0	8,000,000
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	Kecamatan Bunguran Timur	12	60,000,000			0	60,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Air dan Listrik yang Disediakan								
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kecamatan Bunguran Timur	12	876,715,888			0	876,715,888
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen		75	318,435,000			75	318,435,000
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kecamatan Bunguran Timur	6	68,435,000			0	68,435,000
7.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kecamatan Bunguran Timur	5	50,000,000			0	50,000,000
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kecamatan Bunguran Timur	5	180,000,000			0	180,000,000
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kecamatan Bunguran Timur	2	20,000,000			0	20,000,000
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSEN		100	523,558,000			100	523,558,000
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi		55	523,558,000			60	523,558,000
7.01.02.2.02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kelurahan Ranai	12	60,000,000			0	60,000,000
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kecamatan Bunguran Timur	12	463,558,000			0	463,558,000
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	PERSEN		100	101,100,000			100	101,100,000
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen		100	101,100,000			100	101,100,000
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bunguran Timur	8	101,100,000			0	101,100,000
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSEN		25	50,000,000			20	50,000,000
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen		80	50,000,000			90	50,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen		80	50,000,000			90	50,000,000
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Kecamatan Bunguran Timur	12	50,000,000			0	50,000,000
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSEN		100	102,000,000			100	102,000,000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen		100	102,000,000			100	102,000,000
7.01.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Kecamatan Bunguran Timur	8	30,000,000			0	30,000,000
7.01.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kecamatan Bunguran Timur	12	72,000,000			0	72,000,000
07.02.	<u>KELURAHAN RANAI KOTA</u>				465,889,500				464,539,500	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				465,889,500				464,539,500	
7.01.	KECAMATAN				465,889,500				464,539,500	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSEN		100	265,889,500			100	264,539,500
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi		55	265,889,500			60	264,539,500
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kelurahan Ranai	12	265,889,500			0	264,539,500
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	PERSEN		100	200,000,000			100	200,000,000
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi		4	200,000,000			4	200,000,000
7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Kelurahan Ranai	5	200,000,000			0	200,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
07.03.	<u>KELURAHAN BANDARSYAH</u>					465,889,500				462,289,500
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					465,889,500				462,289,500
7.01.	KECAMATAN					465,889,500				462,289,500
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSEN		100	265,889,500			100	262,289,500
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi		55	265,889,500			60	262,289,500
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kelurahan Bandarsyah	12	265,889,500			0	262,289,500
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	PERSEN		100	200,000,000			100	200,000,000
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi		4	200,000,000			4	200,000,000
7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Kelurahan Bandarsyah	5	200,000,000			0	200,000,000
07.04.	<u>KELURAHAN RANAI DARAT</u>					465,889,500				465,889,500
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					465,889,500				465,889,500
7.01.	KECAMATAN					465,889,500				465,889,500
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSEN		100	265,889,500			100	265,889,500
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi		55	265,889,500			60	265,889,500
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kelurahan Ranai Darat	12	265,889,500			0	265,889,500
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	PERSEN		100	200,000,000			100	200,000,000

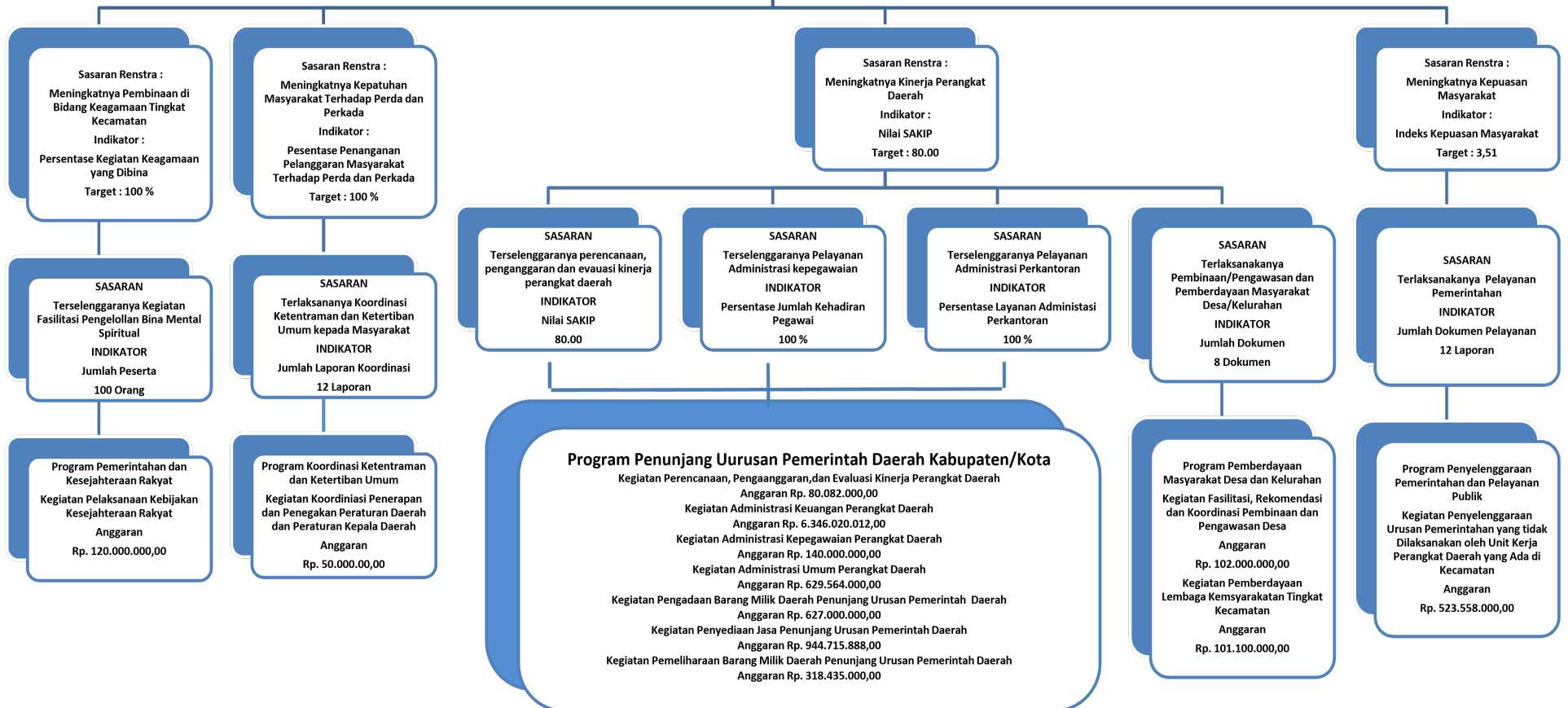
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi		4	200,000,000			4	200,000,000
7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Pokmas / Ormas	Kelurahan Ranai Darat	5	200,000,000			0	200,000,000
07.05.	<u>KELURAHAN BATU HITAM</u>					468,889,500				459,889,500
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					468,889,500				459,889,500
7.01.	KECAMATAN					468,889,500				459,889,500
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSEN		100	268,889,500			100	259,889,500
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi		55	268,889,500			60	259,889,500
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kelurahan Batu Hitam	12	268,889,500			0	259,889,500
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	PERSEN		100	200,000,000			100	200,000,000
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi		4	200,000,000			4	200,000,000
7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Kelurahan Batu Hitam	5	200,000,000			0	200,000,000
		JUMLAH			11,849,032,900		11,479,522,962			

4.2 Cascading dan Crosscutting

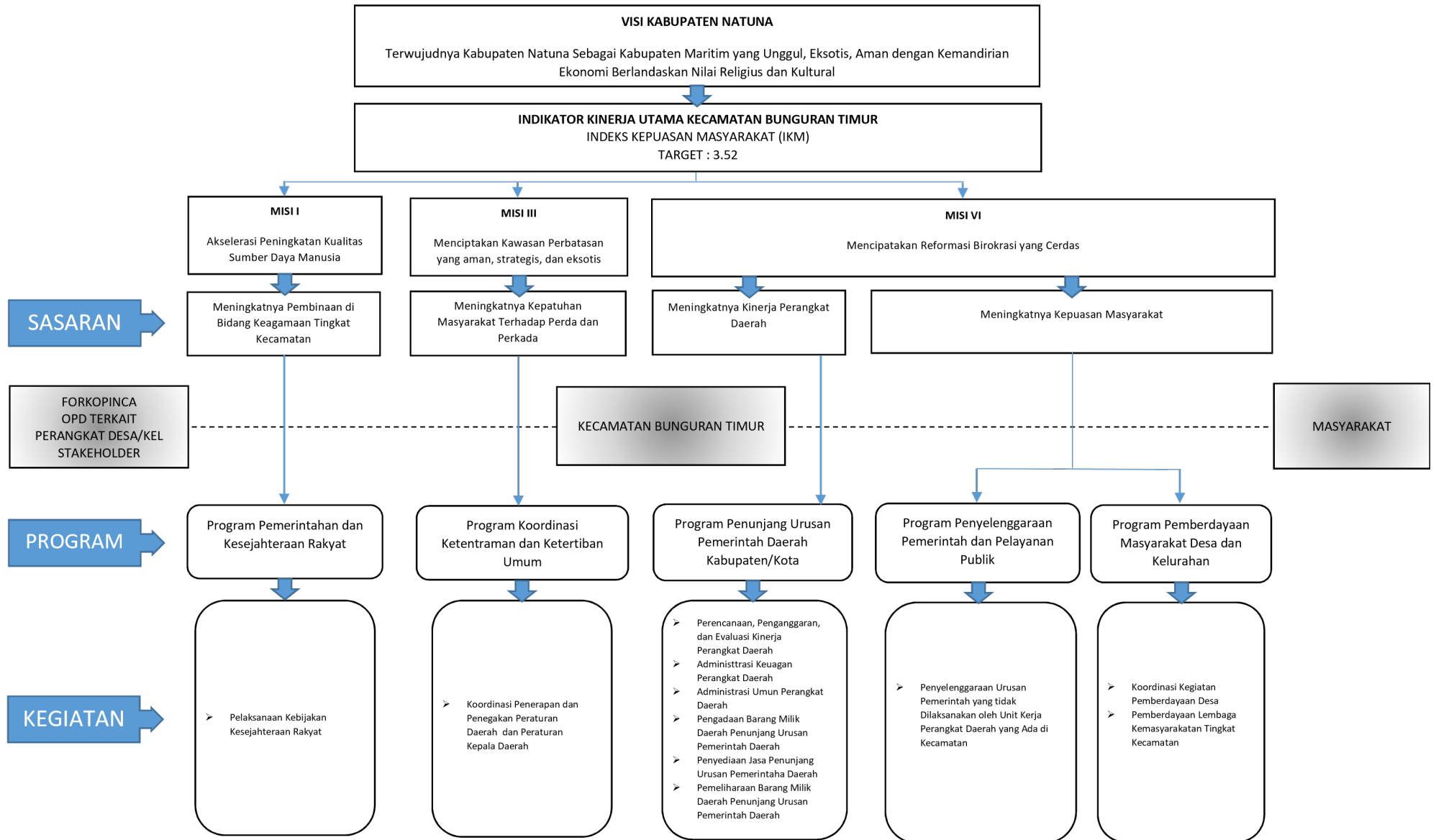
Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauhmana perencanaan Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Cascading Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Cascading Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2026**. sedangkan Crosscutting Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh factor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki structural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada **Cross Cutting Kinerja Program Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2026**.

CASCADING KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TAHUN 2026

KECAMATAN BUNGURAN TIMUR



CROSSCUTTING KECAMATAN BUNGURAN TIMUR 2026



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Kecamatan Bunguran Timur agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Kecamatan Bunguran Timur melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Camat dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan perangkat daerah yang lain.

Semoga dengan tersusunnya Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2026 mendorong peningkatan kualitas kinerja dalam perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .

Selain itu diharapkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kecamatan Bunguran Timur tahun 2026 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Ranai, 24 September 2025

